

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF *FAITH-BASED EMPOWERMENT*: INTEGRASI NILAI KEAGAMAAN DALAM PROGRAM BANK SAMPAH OLEH PT PERTAMINA AFT EL TARI

Ahmad Hidayah¹, Setyo Ariwibowo², Nur Laili Zaihandini³

¹Aviation Fuel Terminal Manager PT Pertamina Patra Niaga AFT EL Tari, Indonesia

²Sr. SPV RSD PT Pertamina Patra Niaga AFT EL Tari, Indonesia

³Community Development Officer PT Pertamina Patra Niaga AFT EL Tari, Indonesia

Email: aviation.koe@pertamina.com

ABSTRAK

Persoalan sampah membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga mampu membangun kesadaran, partisipasi, dan perubahan perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme kolaborasi serta peran institusi keagamaan dan pendekatan *eco-religion* dalam Program Kampung Berseri PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari melalui pengelolaan Bank Sampah Mutiara Timor di Kota Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara *purposive*. Data dianalisis melalui kondensasi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, sedangkan keabsahannya dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dibangun melalui penyelarasan peran antara perusahaan, bank sampah, GMIT, pemerintah, dan masyarakat. Gereja tidak hanya menjadi kanal sosialisasi, tetapi memberikan legitimasi moral yang membingkai pengelolaan sampah sebagai bagian dari tanggung jawab iman dalam menjaga ciptaan. Nilai tersebut diterjemahkan melalui edukasi, pendampingan, pembentukan unit bank sampah, serta inovasi pengolahan sampah. Program berkontribusi terhadap pemberdayaan dalam dimensi ekologis, ekonomi, dan sosial-spiritual. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi CSR, kelembagaan komunitas, dan nilai keagamaan dapat memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, meskipun keberlanjutannya tetap memerlukan penguatan kelembagaan dan pengurangan ketergantungan terhadap dukungan eksternal.

Kata Kunci: Bank Sampah, CSR, Eco-Religion, Institusi Keagamaan, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

Waste management requires approaches that go beyond the provision of infrastructure to foster public awareness, participation, and behavioral change. This study examines multi-actor collaboration and the role of religious institutions and eco-religion in the Kampung Berseri Program implemented by PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari through the Mutiara Timor Waste Bank in Kupang City, Indonesia. The study employed a qualitative approach with a descriptive case study design. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation, with informants selected purposively. Data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification, while

credibility was ensured through triangulation of sources and methods. The findings show that collaboration was built through the alignment of roles among the company, the waste bank, the Evangelical Christian Church in Timor (GMIT), local government, and the community. The church functioned not merely as a channel for program dissemination but also as a source of moral legitimacy, framing waste management as an expression of faith-based responsibility for caring for creation. Religious values were translated into concrete practices through environmental education, community mentoring, the establishment of waste bank units, and waste-processing innovations. These processes contributed to community empowerment across ecological, economic, and socio-spiritual dimensions. The findings demonstrate that integrating corporate social responsibility (CSR), community institutions, and religious values can strengthen community-based environmental management. However, long-term sustainability requires stronger institutional capacity and reduced dependence on external support.

Keywords: *Waste Bank, Corporate Social Responsibility, Eco-Religion, Religious Institutions, Community Empowerment.*

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang bersifat multidimensional yang saat ini masih menjadi tantangan serius dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi, serta pertumbuhan aktivitas ekonomi berkontribusi terhadap meningkatnya timbulan sampah, sementara kapasitas pengelolaan sampah di berbagai wilayah belum berkembang selaras dengan kebutuhan di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengumpulan dan pengangkutan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan, perilaku, dan tata kelola lingkungan yang dilakukan.

Dalam konteks Indonesia, urgensi persoalan tersebut terlihat dari capaian pengelolaan sampah nasional yang masih rendah. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026 menyampaikan bahwa hingga akhir 2025 sampah yang telah terkelola secara nasional baru mencapai sekitar 25%, atau setara dengan 36.684 ton per hari. Sementara itu, sekitar 75% atau 105.483 ton per hari belum tertangani secara memadai dan masih berpotensi mencemari lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan persampahan di Indonesia membutuhkan perubahan paradigma pengelolaan dari pendekatan konvensional menuju pendekatan pengurangan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat, mengandung unsur ekonomi sirkular, dan memberikan kesempatan kolaborasi dari berbagai pihak.

Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi tantangan nyata di tingkat daerah, termasuk di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Kupang menghadapi tekanan pengelolaan sampah yang cukup besar seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan timbunan sampah khas wilayah perkotaan. Berdasarkan keterangan Pemerintah Kota Kupang pada April 2026, timbunan sampah di Kota Kupang mencapai sekitar 267 ton per hari. Meskipun capaian pengelolaan sampah menunjukkan peningkatan dari 41,93 menjadi 50,8, kondisi tersebut masih berada dalam kategori pembinaan dan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Kupang masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Kupang mengembangkan berbagai strategi, seperti pengelolaan sampah berbasis wilayah, pembangunan TPST di setiap kecamatan, pembentukan Satgas Penanganan Sampah, penyediaan kontainer, serta pengaturan waktu pembuangan sampah. Pemerintah juga menargetkan agar sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu, yaitu sekitar 15% dari total timbunan sampah. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dari tingkat sumber hingga pemrosesan akhir (Pemerintah Kota Kupang, 2026).

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada dasarnya tidak dapat hanya mengandalkan intervensi pemerintah melalui kebijakan dan penyediaan infrastruktur. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu elemen penting karena sebagian besar aktivitas yang menghasilkan dan menentukan pola pengelolaan sampah berlangsung pada tingkat rumah tangga dan komunitas. Dalam konteks ini, perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Persoalan rendahnya kesadaran, kebiasaan membuang sampah tanpa memilah, keterbatasan pengetahuan, serta lemahnya insentif ekonomi dapat menjadi hambatan dalam membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Oleh karena itu, intervensi lingkungan perlu dikembangkan melalui pendekatan yang mampu menggabungkan dimensi ekologis dengan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam kasus ini adalah dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi persoalan, mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta mempertahankan keberlanjutan program. Pendekatan pemberdayaan juga telah banyak diaplikasikan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang

pelaksanaannya tidak hanya pada upaya karitatif namun lebih mengedepankan penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi CSR berbasis pemberdayaan masyarakat dapat mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program perusahaan (Risa, 2019; Devi & Kumalasari, 2023).

Dalam perspektif tersebut, *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya dipahami sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menciptakan nilai sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Kajian mengenai integrasi CSR, *environmental sustainability*, dan *community development* menunjukkan bahwa program CSR memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan ketika dirancang melalui pendekatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, bukan sekadar melalui kegiatan bantuan jangka pendek (Sari et al., 2025). Dengan demikian, efektivitas CSR sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam keseluruhan proses program, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Bentuk nyata program pemberdayaan masyarakat dalam bidang lingkungan yang berkembang dan banyak diadopsi oleh perusahaan dalam program CSR adalah bank sampah. Bank sampah pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan sampah, tetapi juga dapat menjadi instrumen edukasi lingkungan, penguatan partisipasi masyarakat, dan penciptaan nilai ekonomi melalui pemilahan serta pemanfaatan sampah. Namun demikian, keberhasilan bank sampah tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya fasilitas atau mekanisme insentif ekonomi. Keberlanjutan program juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, jaringan sosial, kepemimpinan lokal, serta hubungan kepercayaan antara masyarakat dengan aktor yang menjalankan program. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada hakikatnya merupakan persoalan sosial sekaligus ekologis. Oleh karena itu, strategi pengelolaan sampah perlu memperhatikan struktur sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas.

Salah satu komunitas yang memiliki potensi penting yang bisa dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat ialah institusi keagamaan. Hal ini dikarenakan institusi keagamaan memiliki karakteristik yang berbeda dari organisasi formal lainnya karena memiliki kedekatan sosial, legitimasi moral, jejaring komunitas, serta kemampuan untuk mempengaruhi nilai dan perilaku anggotanya. Nilai-nilai keagamaan dapat menjadi sumber

motivasi moral yang mendorong individu untuk memandang kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual. Sehingga intervensi yang dilakukan dapat meluas tidak hanya pada dimensi sosial, ekonomi, tapi juga melibatkan dimensi keagamaan dan spiritual.

Fenomena tersebut telah ditangkap secara positif oleh PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) El Tari dengan menjembatani kelompok bank sampah dengan institusi keagamaan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur melalui program Kampung Berseri. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang berorientasi pada penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program tersebut melibatkan Bank Sampah Mutiara Timor sebagai mitra pelaksana pemberdayaan masyarakat dan secara aktif menggandeng gereja dalam hal ini adalah Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT), pemerintah, komunitas, dan masyarakat untuk memperkuat pengelolaan sampah di Kota Kupang.

Program Kampung Berseri PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari merupakan konteks yang relevan untuk mengkaji keterkaitan antara CSR, pemberdayaan masyarakat, dan eco-religion dalam pengelolaan sampah. Program ini melibatkan kolaborasi multipihak, yaitu perusahaan sebagai inisiator dan fasilitator, Bank Sampah Mutiara Timor sebagai pengelola, masyarakat sebagai subjek pemberdayaan, serta Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) sebagai institusi keagamaan yang memiliki legitimasi sosial dan moral di tengah komunitas. Keterlibatan para aktor tersebut membuka ruang bagi integrasi antara kepentingan perusahaan, kapasitas komunitas, dan nilai-nilai keagamaan dalam mendorong perubahan perilaku serta membangun pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Namun, keterlibatan multipihak tidak serta-merta menghasilkan kolaborasi yang efektif. Penting untuk memahami bagaimana pembagian peran, hubungan antar aktor, dan mekanisme kolaborasi dibangun, serta bagaimana nilai-nilai keagamaan diterjemahkan menjadi kesadaran dan tindakan ekologis masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendekatan eco-religion dalam program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Bank Sampah Mutiara Timor. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana mekanisme kolaborasi antara PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, GMIT, Bank Sampah Mutiara Timor, dan masyarakat dalam pengelolaan Program Kampung Berseri?; dan (2) bagaimana peran institusi

keagamaan dan pendekatan eco-religion dalam membangun kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan?

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai CSR, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, dan *eco-religion*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model kolaborasi antara sektor korporasi dan institusi keagamaan yang dapat diadaptasi dan direplikasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah lain.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekoteologi dan Eco-Religion: Dari Doktrin menuju Praksis Ekologis

Kajian mengenai hubungan agama dan lingkungan berkembang setelah White (1967) memicu perdebatan tentang pengaruh pandangan antroposentris dalam tradisi keagamaan terhadap krisis ekologis. Kritik tersebut mendorong berkembangnya ekoteologi (*eco-theology*) sebagai upaya merekonstruksi pemahaman teologis mengenai relasi antara Allah, manusia, dan alam agar lebih responsif terhadap kerusakan lingkungan (Deane-Drummond, 2008; Gottlieb, 2006). Ekoteologi menempatkan persoalan lingkungan bukan semata-mata sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai persoalan etis dan spiritual.

Dalam tradisi Kristen, ekoteologi menggeser penafsiran mengenai dominasi manusia atas alam (*dominion*) menuju tanggung jawab penatalayanan ciptaan (*creation stewardship*) (Berry, 2006; Fowler, 1995). Manusia tidak diposisikan sebagai pemilik yang bebas mengeksploitasi alam, melainkan sebagai bagian dari komunitas ciptaan yang bertanggung jawab memelihara keberlanjutan kehidupan. Moltmann (1985) dan McFague (1993) menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik sebagai bagian dari karya penciptaan dan ruang kehadiran Tuhan. Dengan demikian, kerusakan ekologis dapat dipahami sebagai keretakan relasi antara manusia, Tuhan, dan ciptaan lainnya. Dimensi keadilan dalam ekoteologi dipertegas oleh Boff (1997), yang menghubungkan penderitaan bumi dengan penderitaan masyarakat miskin dan marginal. Kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga menciptakan beban sosial-ekonomi yang lebih besar bagi kelompok rentan. Pemikiran tersebut sejalan dengan konsep ekologi integral dalam Laudato si', yang menegaskan bahwa persoalan lingkungan, kemiskinan, ketimpangan, dan kualitas kehidupan manusia merupakan persoalan yang saling berhubungan (Francis, 2015). Dalam

konteks Indonesia, etika lingkungan berbasis agama juga menempatkan kepedulian terhadap alam sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia (Chang, 2001).

Ekoteologi perlu dibedakan dari eco-religion. Ekoteologi bergerak pada ranah normatif, yakni penafsiran teologis mengenai relasi manusia dan alam. Sementara itu, eco-religion dalam penelitian ini digunakan secara operasional untuk menjelaskan proses ketika nilai, simbol, ajaran, dan otoritas keagamaan diterjemahkan menjadi praktik perlindungan lingkungan. Pengertian ini berdekatan dengan konsep *religious environmentalism*, yaitu keterlibatan komunitas keagamaan dalam membangun kesadaran dan tindakan ekologis (Gottlieb, 2006; Grim & Tucker, 2014).

Penggunaan istilah *eco-religion* dalam penelitian ini tidak sepenuhnya disamakan dengan konsep *dark green religion* dari Taylor (2010), yang merujuk pada bentuk spiritualitas yang memandang alam sebagai sesuatu yang sakral dan memiliki nilai intrinsik. Dalam konteks penelitian ini, eco-religion merujuk pada artikulasi nilai-nilai keagamaan yang telah ada dalam praktik ekologis sehari-hari. Praktik memilah sampah, mengurangi limbah, mendaur ulang, dan menjaga kebersihan lingkungan dapat dipahami sebagai ekspresi iman yang diwujudkan dalam kehidupan konkret. Perspektif ini sejalan dengan konsep *lived religion*, yang melihat agama bukan hanya sebagai doktrin formal, tetapi juga sebagai sesuatu yang dihayati melalui kebiasaan, tindakan, dan pengalaman sehari-hari (McGuire, 2008).

Dalam konteks rumah ibadah, transformasi tersebut dapat berlangsung melalui khotbah, pendidikan lingkungan, keteladanan pemimpin agama, pembentukan aturan komunitas, dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah (Prabowo et al., 2020). Studi Abdussamad dan Handayani (2022) di Jemaat Gereja Rehobot, Kota Kupang, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat memperoleh makna teologis ketika dipahami sebagai bentuk ketaatan dan tanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, institusi keagamaan berperan sebagai perantara yang menerjemahkan ajaran teologis menjadi norma sosial dan tindakan ekologis kolektif.

Pemberdayaan Berbasis Iman dan Kolaborasi Multi Aktor

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, partisipasi, dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya yang memengaruhi kehidupannya (Ife & Tesoriero, 2006; Suharto, 2014; Zubaedi, 2013). Pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi menempatkan masyarakat sebagai subjek yang

mampu mengidentifikasi masalah, menentukan pilihan, mengelola sumber daya, dan mempertahankan keberlanjutan program secara mandiri.

Soetomo (2009, 2011) menempatkan pemberdayaan sebagai proses pembelajaran sosial yang bertumpu pada potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas atau meningkatnya pendapatan, tetapi juga dari tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk mengorganisasikan diri, mengambil keputusan, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Pemikiran tersebut sejalan dengan konsep kesadaran kritis dari Freire (1970), pendekatan intervensi komunitas dari Adi (2013), serta pembangunan sosial dari Midgley (1995). Masyarakat perlu memperoleh ruang untuk memahami akar persoalan, mengembangkan kemampuan, serta menentukan tindakan kolektif yang sesuai dengan kondisi lokal.

Ketika proses tersebut menggunakan nilai, jaringan, dan institusi keagamaan sebagai sumber penggerak, pemberdayaan dapat dianalisis melalui perspektif faith-based empowerment. Istilah ini digunakan sebagai perspektif analitis untuk menjelaskan bagaimana nilai iman, kepercayaan sosial, kepemimpinan keagamaan, dan jaringan jemaat digunakan untuk meningkatkan kapasitas serta partisipasi masyarakat. Gereja sebagai organisasi berbasis iman (faith-based organization) memiliki modal institusional berupa legitimasi moral, jaringan sosial, ruang pertemuan yang relatif stabil, dan hubungan kepercayaan dengan komunitas (Clarke, 2006; Deneulin & Bano, 2009; Tomalin, 2013).

Meskipun demikian, keberadaan institusi keagamaan tidak secara otomatis menghasilkan pemberdayaan. Clarke (2006) dan Rakodi (2012) mengingatkan bahwa organisasi berbasis iman bersifat beragam dan dapat memperkuat atau justru membatasi partisipasi, tergantung pada pola kepemimpinan, keterbukaan, dan relasinya dengan kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, peran gereja perlu dianalisis berdasarkan kemampuannya menciptakan partisipasi yang inklusif, menghindari ketergantungan, serta membuka ruang keterlibatan bagi masyarakat lintas kelompok dan agama.

Dalam Program Kampung Berseri, pemberdayaan berbasis iman berlangsung melalui kolaborasi antara perusahaan, GMIT, Bank Sampah Mutiara Timor, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut tidak cukup dipahami sebagai pembagian tugas administratif, melainkan sebagai proses membangun tujuan bersama, kepercayaan, kapasitas, dan tindakan kolektif. Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, serta pemahaman bersama dalam kolaborasi. Emerson et al. (2012)

selanjutnya merumuskan tiga unsur utama dalam dinamika kolaboratif, yaitu keterlibatan berprinsip (*principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

Kerangka tersebut membantu menjelaskan posisi setiap aktor. Perusahaan berperan menyediakan fasilitasi, sumber daya, dan dukungan pengembangan program; gereja menyediakan legitimasi moral dan jaringan sosial; Bank Sampah Mutiara Timor menyediakan pengetahuan serta kapasitas teknis; pemerintah memberikan dukungan kelembagaan dan keterhubungan dengan kebijakan publik; sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama perubahan perilaku. Keberhasilan program dengan demikian ditentukan oleh kemampuan para aktor menyelaraskan kepentingan, membangun kepercayaan, membagi peran, dan mengembangkan kapasitas bersama.

Model Integratif Ekoteologi, Kolaborasi, dan Pemberdayaan melalui Bank Sampah

Kerangka penelitian ini mengintegrasikan ekoteologi, eco-religion, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multi aktor, dan inovasi akar rumput (*grassroots innovation*). Integrasi tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa nilai keagamaan tidak secara otomatis menghasilkan perubahan ekologis. Nilai tersebut harus diterjemahkan melalui kelembagaan, kolaborasi, pendidikan, pendampingan, serta praktik yang dilakukan secara berulang.

Alur analisis penelitian dirumuskan dalam tiga tahapan: (1) perencanaan dan advokasi sebagai proses mempertemukan nilai teologis dan agenda lingkungan; (2) edukasi, pendampingan, dan praktik pengelolaan sampah sebagai proses pembentukan kapasitas dan partisipasi; serta (3) capaian ekologis, ekonomi, dan sosial-spiritual sebagai hasil pemberdayaan.

Tahap pertama menjelaskan proses ketika nilai teologis dan kepedulian lingkungan dipertemukan menjadi kerangka tindakan bersama. Gerakan bank sampah tidak hanya didorong oleh persoalan volume sampah, tetapi juga oleh proses pemaknaan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab iman. Nilai penatalayanan ciptaan, kepedulian terhadap sesama, serta tanggung jawab antargenerasi menjadi dasar moral untuk membangun kesadaran ekologis (Francis, 2015; Grim & Tucker, 2014). Pada tahap ini, gereja berperan sebagai penerjemah nilai keagamaan, sedangkan perusahaan dan pengelola bank sampah membantu mengubah nilai tersebut menjadi rancangan program. Advokasi lingkungan dilakukan melalui dialog, sosialisasi, khotbah, pertemuan komunitas, dan pembentukan

komitmen bersama. Proses tersebut dianalisis melalui tiga aspek, yaitu pembentukan pemahaman bersama mengenai masalah sampah, pembagian peran antar pemangku kepentingan, dan pembangunan legitimasi sosial terhadap program.

Tahap kedua merupakan proses penerjemahan nilai dan komitmen menjadi praktik di tingkat akar rumput. Praktik tersebut mencakup pemilahan sampah dari rumah tangga, penimbangan, pencatatan tabungan, pengolahan sampah organik dan anorganik, daur ulang, serta pengembangan produk bernilai ekonomi (Suwerda, 2012). Dalam tahap ini, bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai unit teknis pengelolaan limbah, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran sosial. Edukasi dan pendampingan memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kolektif dalam menyelesaikan persoalan lingkungan. Aktivitas yang dilakukan secara rutin membantu mengubah pemilahan sampah dari kegiatan insidental menjadi kebiasaan sosial. Dalam perspektif Freire (1970), proses tersebut dapat dipahami sebagai pembentukan kesadaran kritis karena masyarakat tidak hanya diberi informasi, tetapi dilibatkan dalam memahami masalah dan mengembangkan solusi.

Praktik bank sampah juga dapat dilihat sebagai inovasi akar rumput, yaitu solusi yang tumbuh dari kebutuhan komunitas serta dikembangkan melalui pengetahuan, jaringan, dan sumber daya lokal (Seyfang & Smith, 2007). Inovasi tidak hanya terletak pada teknologi pengolahan sampah, tetapi juga pada pembentukan sistem tabungan, pengembangan produk daur ulang, pemanfaatan dana untuk kebutuhan sosial, dan pengintegrasian pesan keagamaan dalam pendidikan lingkungan. Studi mengenai Bank Sampah Mutiara Timor menunjukkan bahwa kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan pengembangan nilai ekonomi sampah merupakan unsur penting dalam keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis komunitas (Hidayah et al., 2025; Ramadani et al., 2025).

Tahap ketiga digunakan untuk menilai kontribusi program terhadap pemberdayaan masyarakat. Capaian program tidak ditempatkan sebagai asumsi awal, tetapi dianalisis berdasarkan tiga dimensi berikut.

1. Dimensi ekologis. Dimensi ini mencakup perubahan pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam memilah serta mengurangi sampah, berkurangnya sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, dan meningkatnya kebersihan lingkungan permukiman serta rumah ibadah. Selain hasil fisik, dimensi ekologis juga mencakup pelestarian kebiasaan ramah lingkungan dalam kehidupan komunitas (Prabowo et al., 2020).

2. Dimensi ekonomi. Dimensi ini mencakup terbentuknya nilai tambah dari sampah melalui tabungan, penjualan bahan daur ulang, pengembangan produk, atau pemanfaatan pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga dan kegiatan sosial. Bank sampah merepresentasikan praktik ekonomi sirkular pada tingkat komunitas karena mengubah material yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi sumber daya ekonomi (Hidayah et al., 2025; Ramadani et al., 2025; Suwerda, 2012).
3. Dimensi sosial-spiritual. Dimensi ini mencakup meningkatnya partisipasi, kemampuan mengorganisasikan kegiatan, solidaritas, kepercayaan, dan kemandirian masyarakat. Dari sisi spiritual, capaian terlihat ketika nilai keagamaan tidak berhenti pada khotbah atau doktrin, tetapi diwujudkan dalam tindakan menjaga lingkungan dan kepedulian terhadap sesama. Keterlibatan masyarakat lintas agama juga dapat memperluas fungsi program dari gerakan internal gereja menjadi ruang pembentukan kohesi sosial. Dalam perspektif lived religion, praktik pengelolaan sampah menjadi salah satu bentuk konkret penghayatan iman dalam kehidupan sehari-hari (Abdussamad & Handayani, 2022; McGuire, 2008).

Berdasarkan sintesis tersebut, proposisi analitis penelitian ini adalah bahwa nilai ekoteologis dapat mendorong pemberdayaan dan perubahan perilaku apabila dimediasi oleh legitimasi institusi keagamaan, kolaborasi multi aktor, pendidikan yang berkelanjutan, dan praktik pengelolaan sampah yang memberikan manfaat nyata. Dengan demikian, kerangka ini tidak hanya menelaah keberadaan nilai keagamaan, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai tersebut diterjemahkan, dinegosiasikan, dan dilembagakan menjadi tindakan ekologis kolektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif untuk memahami secara kontekstual implementasi program CSR berbasis eco-religion dalam pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Mutiara Timor pada Program Kampung Berseri PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari (Creswell & Poth, 2018). Penelitian dilaksanakan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada kolaborasi antara perusahaan, pengelola bank sampah, institusi keagamaan, pemerintah, dan masyarakat. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap program (Patton, 2015). Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi yang mencakup peran antar aktor, partisipasi masyarakat, mekanisme kolaborasi,

serta dampak ekologis, ekonomi, dan sosial-spiritual. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2020). Data dikodekan, dikelompokkan ke dalam kategori tematik, dan dibandingkan antaraktor untuk menemukan pola dan hubungan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kredibilitas temuan (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Kampung Berseri memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan pengetahuan teknis. Program berkembang melalui pertemuan antara kepentingan lingkungan, kapasitas kelembagaan lokal, insentif ekonomi, dan nilai keagamaan yang hidup di dalam komunitas. Dalam proses tersebut, PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, Bank Sampah Mutiara Timor (BSMT), Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjalankan fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Perusahaan menyediakan dukungan program dan sumber daya; BSMT menerjemahkan gagasan program menjadi praktik pengelolaan sampah; GMIT memberikan legitimasi moral dan jaringan sosial; pemerintah memberikan dukungan kelembagaan; sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Berdasarkan proses tersebut, hasil penelitian dibahas melalui tiga bagian, yaitu proses perencanaan dan advokasi; edukasi, pendampingan, dan praktik pengelolaan sampah; serta capaian program dalam dimensi ekologis, ekonomi, dan sosial-spiritual.

Proses Perencanaan dan Advokasi: Pertemuan Nilai Ekologis dan Teologis

Program Kampung Berseri berangkat dari persoalan pengelolaan sampah yang konkret di tingkat lokal. Hasil pemetaan sosial tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 30 responden di Kelurahan Penfui, sebanyak 73% masih mengelola sampah rumah tangga dengan cara membakar, 20% membuangnya ke tempat pembuangan sementara, dan 7% membuangnya ke lingkungan. Tidak ada responden yang menyerahkan sampahnya kepada bank sampah (PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak hanya berupa keterbatasan infrastruktur, tetapi juga belum

terbentuknya pengetahuan, kebiasaan, dan saluran kelembagaan yang memungkinkan masyarakat memilah sampah dari sumbernya.

Temuan pemetaan sosial tersebut menjadi dasar bagi penyusunan program. Tahap awal dilakukan melalui studi kelayakan, observasi lapangan, perencanaan teknis, dan pemetaan kebutuhan di Penfui dan Sikumana. Proses ini melibatkan PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, BSMT, Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sekolah, dan komunitas keagamaan (PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, 2025a). Dengan demikian, perencanaan tidak hanya berfungsi menyusun kegiatan, tetapi juga mempertemukan pengetahuan teknis, pengalaman masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya para pihak. Pola tersebut menempatkan masyarakat dan organisasi lokal sebagai bagian dari proses identifikasi masalah serta perumusan solusi, bukan semata-mata sebagai penerima bantuan.

Kolaborasi dengan GMIT menjadi titik penting dalam perkembangan program. Pertimbangan untuk melibatkan gereja tidak hanya didasarkan pada luasnya jaringan jemaat, tetapi juga pada kemampuan institusi keagamaan dalam memberikan makna moral terhadap persoalan lingkungan. Dalam advokasi perubahan iklim berbasis komunitas agama, perwakilan dari 10 gereja GMIT Klasik Kota Kupang memperoleh edukasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, pemanfaatan kembali limbah anorganik, dan peran gereja dalam mendorong perubahan perilaku umat. Perusahaan kemudian menyediakan bak sampah kepada 10 gereja tersebut sebagai sarana awal untuk membangun praktik pengelolaan sampah di lingkungan gereja (PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, 2025).

Pada tahap ini terjadi pertemuan antara rasionalitas ekologis dan motivasi teologis. Sampah yang sebelumnya dipahami sebagai persoalan kebersihan mulai dibingkai sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Tuhan. Perwakilan GMIT dalam proses penyusunan rencana kerja menegaskan bahwa gereja memiliki jaringan hingga tingkat jemaat yang dapat digunakan sebagai media edukasi untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan dan pelestarian ciptaan (PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, 2026). Artinya, gereja tidak sekadar berfungsi sebagai kanal sosialisasi perusahaan, tetapi ikut membentuk cara komunitas memahami masalah dan alasan moral untuk bertindak.

Temuan ini memperlihatkan mekanisme kolaborasi yang berlangsung melalui empat proses. Pertama, para aktor membangun definisi bersama mengenai sampah sebagai persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kedua, terjadi pembagian peran sesuai sumber daya masing-masing aktor. Ketiga, nilai keagamaan digunakan untuk memperkuat penerimaan dan

legitimasi sosial program. Keempat, legitimasi tersebut diterjemahkan ke dalam komitmen kelembagaan dan penyediaan sarana untuk memulai praktik. Mekanisme ini sejalan dengan karakter organisasi berbasis agama yang memiliki modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan komunitas (Deneulin & Bano, 2009; Tomalin, 2013). Dalam konteks Kupang, Abdussamad dan Handayani (2022) juga menunjukkan bahwa legitimasi keagamaan dapat mengubah pengelolaan sampah menjadi bentuk ketaatan kepada Tuhan dan memperkuat pelembagaan praktik ekologis di lingkungan gereja.

Dengan demikian, kekhasan tahap perencanaan Program Kampung Berseri terletak pada proses penerjemahan nilai. Kepentingan perusahaan dalam menjalankan CSR lingkungan, kompetensi teknis BSMT, dan mandat teologis gereja tidak berjalan secara terpisah, tetapi dipertemukan dalam narasi bersama mengenai tanggung jawab menjaga lingkungan. Proses ini menjadi fondasi bagi terbentuknya eco-religion, yaitu ketika nilai keagamaan tidak berhenti sebagai ajaran normatif, tetapi diarahkan menuju tindakan ekologis yang terorganisasi di tingkat komunitas.

Edukasi, Pendampingan, dan Praktik Pengelolaan Sampah

Nilai dan komitmen yang dibangun pada tahap perencanaan selanjutnya diterjemahkan ke dalam rangkaian edukasi, pendampingan, penyediaan sarana, dan praktik pengelolaan sampah. Intervensi tidak dilakukan melalui satu kegiatan tunggal, tetapi melalui beberapa ruang pembelajaran, yaitu tempat kerja, permukiman, sekolah, bank sampah, pameran publik, dan komunitas keagamaan. Pola ini memperluas jangkauan program sekaligus menyesuaikan pesan lingkungan dengan karakter kelompok sasaran.

Di lingkungan perusahaan, pelatihan pemilahan sampah melibatkan 40 pekerja AFT El Tari dan menghasilkan peningkatan pemahaman sebesar 60% berdasarkan perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan unit bank sampah di lingkungan perusahaan. Pada tingkat masyarakat, kegiatan *Roadshow* Ubah Sampah Jadi Berkah di Sikumana melibatkan 60 warga dari kelompok ibu rumah tangga, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan nilai ekonomi sampah, tetapi juga ditindaklanjuti dengan pembentukan unit bank sampah di Kelurahan Sikumana (PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, 2025b). Pola ini menunjukkan bahwa edukasi dihubungkan dengan pembentukan wadah kolektif sehingga pengetahuan yang diperoleh memiliki saluran untuk dipraktikkan.

Pada tahap lanjutan, pendekatan program terus diperluas melalui kolaborasi antara PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, BSMT, gereja, pemerintah, dan komunitas masyarakat di tingkat lokal masih dilakukan hingga saat ini. Salah satu implementasi terbaru dilakukan pada pertengahan 2026 di wilayah Liliba dengan melibatkan Gereja GMT Moria Liliba dan Forum Kupang Green and Clean Liliba. Kolaborasi tersebut tidak hanya diarahkan pada sosialisasi mengenai pemilahan sampah, tetapi juga pada pembentukan ruang praktik di tingkat masyarakat melalui peresmian Bank Sampah Unit RW 14 Liliba yang dikelola oleh komunitas lokal. Pada saat yang sama, Pertamina bersama Forum Kupang Green and Clean memberikan bantuan tempat sampah terpilah kepada GMT Moria Liliba sebagai dukungan terhadap penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber di lingkungan gereja (PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, 2026).

BSMT memainkan peran sentral sebagai penghubung antara edukasi dan praktik. Lembaga ini menyediakan pengetahuan mengenai jenis dan nilai sampah, mekanisme pemilahan, penimbangan dan pencatatan, pengolahan, serta akses terhadap rantai daur ulang. Peran tersebut menjadikan BSMT bukan hanya sebagai tempat penampungan material, tetapi sebagai *knowledge broker* yang menerjemahkan konsep ekonomi sirkular ke dalam kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat sehari-hari. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memahami bahwa sampah yang telah dipilah memiliki nilai tukar, sedangkan BSMT memperoleh pasokan material yang lebih teratur dan memperluas jaringan pengelolaannya.

Pembelajaran juga dikembangkan melalui inovasi pengolahan. Workshop Kriya Berseri melibatkan 10 pekerja BSMT untuk mengolah minyak jelantah, plastik, dan kertas bekas menjadi lilin, gantungan kunci, serta kerajinan kertas daur ulang. Pelatihan *eco-enzyme* mengajarkan pengolahan sampah organik menjadi *eco-enzyme* dan pupuk organik cair. Bahan organik antara lain diperoleh dari Hotel Harper Kupang, sedangkan hasil pengolahan dimanfaatkan untuk Taman Keanekaragaman Hayati AFT El Tari dan Kebun Uma Pere. Rantai ini memperlihatkan terbentuknya praktik sirkular lokal karena limbah dari satu aktor diproses oleh komunitas dan digunakan kembali untuk kegiatan lingkungan serta pertanian (PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, 2025b).

Program juga memperluas pendidikan lingkungan kepada generasi muda melalui Bank Sampah *Goes to School*. Di SMAN 4 Kupang, perwakilan OSIS dan kelas dilibatkan sebagai penggerak bagi siswa lain. Kegiatan tersebut menghasilkan pembentukan unit bank sampah sekolah dengan 20 anggota. Sekolah, dalam hal ini, berfungsi sebagai ruang pembiasaan,

sedangkan siswa berperan sebagai agen yang berpotensi membawa praktik pemilahan ke lingkungan keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku dibangun melalui penyebaran norma pada berbagai arena sosial, tidak hanya melalui nasabah bank sampah.

Di lingkungan gereja, edukasi teknis dipadukan dengan pesan mengenai tanggung jawab menjaga ciptaan. Penyediaan bak sampah kepada 10 gereja memberi sarana untuk mengubah pesan moral menjadi praktik yang dapat diamati dan diulang. Keterlibatan gereja dalam tahap ini juga memperlihatkan adanya perluasan fungsi lembaga keagamaan dari sekadar mitra kegiatan menjadi agen penyebaran pengetahuan lingkungan. Pengetahuan yang diperoleh melalui sosialisasi dan praktik pengelolaan sampah dapat diteruskan melalui ruang-ruang pembinaan jemaat, termasuk mimbar gereja dan kegiatan Sekolah Minggu. Temuan ini sejalan dengan Abdussamad & Handayani (2022), yang menjelaskan bahwa nilai ekoteologis menjadi terlembaga ketika pengetahuan keagamaan diwujudkan melalui kegiatan pemilahan, pengelolaan bank sampah, pembuatan kompos, dan pengurangan plastik sekali pakai, kemudian dilakukan secara berulang hingga menjadi kebiasaan komunitas. Dengan cara tersebut, pesan mengenai pemilahan dan kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya berhenti pada peserta kegiatan, tetapi berpotensi ditransmisikan kepada anggota jemaat dan anak-anak sejak usia dini. Proses ini menjadi penting dalam perspektif *Eco-Religion* karena nilai kepedulian terhadap ciptaan mulai diterjemahkan ke dalam kebiasaan dan praktik kehidupan sehari-hari.

Inovasi program tidak hanya terlihat pada produk daur ulang, tetapi juga pada perbaikan proses kerja. Bantuan *hoist crane* kepada BSMT mengurangi kebutuhan pekerja untuk memindahkan *baling press* secara manual. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan perusahaan mencatat bahwa waktu pemindahan berkurang dari 15 jam menjadi 5 jam saja, sedangkan jumlah pekerja yang dibutuhkan turun dari empat sampai lima orang menjadi dua orang. Risiko cedera dan kebutuhan waktu pemulihan juga dapat ditekan. Secara keseluruhan, laporan monitoring mencatat peningkatan efisiensi operasional bank sampah sebesar 65% (PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, 2025b). Temuan tersebut menunjukkan bahwa inovasi sosial perlu didukung inovasi teknis yang memperbaiki keselamatan, produktivitas, dan kelayakan kerja penerima manfaat.

Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan berlangsung sebagai proses pembelajaran sosial. Pelatihan memberi pengetahuan; pendampingan membangun kemampuan; sarana memungkinkan pengetahuan dipraktikkan; sedangkan unit

bank sampah menyediakan organisasi untuk mempertahankan praktik tersebut. Hal ini sejalan dengan Soetomo (2011, 2014), yang menempatkan pemberdayaan sebagai proses peningkatan kapasitas dan pemobilisasian sumber daya lokal, serta dengan konsep *grassroots innovation* yang menekankan lahirnya solusi berkelanjutan melalui pengetahuan dan eksperimen komunitas (Seyfang & Smith, 2007). Dalam Program Kampung Berseri, inovasi bukan semata-mata teknologi baru, melainkan kombinasi antara perubahan makna, penguatan organisasi, keterampilan, jejaring, dan teknologi tepat guna.

Pelaksanaan Program Kampung Berseri menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis komunitas tidak berlangsung semata-mata melalui penyediaan sarana dan edukasi teknis, tetapi melalui proses yang melibatkan nilai, kelembagaan, partisipasi, dan praktik sosial masyarakat. Keterlibatan gereja dalam program menjadi penting karena gereja memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran dan menggerakkan partisipasi jemaat melalui nilai-nilai keagamaan yang telah melekat dalam kehidupan komunitas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dianalisis melalui tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu proses sebelum intervensi, proses intervensi, dan capaian setelah intervensi. Ketiga tahapan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai teologis dan kekuatan kelembagaan gereja ditransformasikan menjadi praktik pengelolaan sampah, serta bagaimana praktik tersebut menghasilkan perubahan pada dimensi ekologis, ekonomi, dan sosial-spiritual.

Capaian Program: Pemberdayaan Ekologis, Ekonomi, dan Sosial-Spiritual

Capaian Program Kampung Berseri dapat dilihat pada tiga dimensi yang saling berhubungan. Namun, capaian tersebut perlu dipahami sebagai *outcome* yang sedang berkembang, bukan sebagai kondisi akhir pemberdayaan. Hingga saat ini, implementasi, pendampingan dan penyediaan dukungan teknis masih dilakukan. Sementara itu, berdasarkan dokumen rencana strategis, program ini menargetkan pengalihan tanggung jawab pengelolaan kepada masyarakat dan BSMT pada tahun 2027 serta monitoring mandiri pada tahun 2028 (PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, 2025a). Oleh karena itu, indikator kemandirian perlu dilihat sebagai proses bertahap.

Capaian pertama adalah pada dimensi ekologis. Perubahan paling mendasar terlihat pada terbentuknya saluran pengelolaan sampah dari asal/sumbernya. Jika pada pemetaan sosial tahun 2024 menunjukkan bahwa saat itu tidak ada responden yang menggunakan bank sampah dan 73% masih membakar sampah, perkembangan program telah memperlihatkan terjadinya

penambahan pada unit, nasabah, serta praktik pemilahan. Ramadani et al. (2025) mencatat perkembangan jaringan BSMT atau bank sampah abang menjadi 29 unit di 18 kelurahan, dengan 78 nasabah aktif dan jangkauan lebih dari 3.304 rumah tangga. Jaringan tersebut telah mengelola sekitar 99.947,6 kilogram sampah dari sumbernya (PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, 2025b). Sementara itu, berdasarkan hasil laporan internal Bank Sampah Mutiara Timor, sejak sosialisasi pertama yang dilakukan pada di bulan Juni 2026, Bank Sampah Unit Gereja telah melakukan 3 kali penyetoran sampah dengan hasil penimbangan sampah plastik mencapai lebih dari 1 ton.

Capaian ekologis tersebut tidak hanya terletak pada jumlah sampah yang dikelola, tetapi pada perubahan sistem. Rumah tangga, sekolah, tempat kerja, dan gereja mulai terhubung dengan jaringan pemilahan dan penyaluran sampah. Pengolahan sampah organik menjadi *eco-enzyme* dan pupuk organik cair, serta pengolahan sampah anorganik menjadi kerajinan, memperpanjang siklus pemanfaatan material. Dengan demikian, program mendorong pergeseran dari pola buang-bakar menuju pola pilah-kumpul-olah-manfaatkan. Hal ini merupakan kontribusi program terhadap pengalihan sampah dan perubahan perilaku masyarakat.

Yang kedua adalah dimensi ekonomi. Bank sampah mengubah sampah dari benda yang dianggap tidak bernilai menjadi material yang memiliki nilai tukar. Nilai ekonomi diperoleh melalui penjualan sampah terpilah, tabungan sampah, produksi kerajinan, serta pengembangan *eco-enzyme* dan produk turunannya. Berdasarkan daftar harga Bank Sampah Mutiara Timor (BSMT) Juli 2026, nilai material yang dikumpulkan bervariasi menurut jenis dan tingkat pemilahannya, seperti kardus sebesar Rp1.600/kg, HVS berkualitas baik Rp1.700/kg, PET bening hasil sortir Rp4.700/kg, dan kaleng minuman Rp14.000/kg dan lainnya. Bagi BSMT, peningkatan volume material memperkuat fungsi bank sampah sebagai lembaga pengumpulan dan pengolahan material bernilai jual, bahkan Hidayah et al. (2025) menemukan peningkatan pendapatan pekerja BSMT dalam rentang 20–180% dari aktivitas pengelolaan bank sampah tersebut. Sedangkan bagi jemaat, sebagai peserta pada unit bank sampah gereja, aktivitas tersebut membuka peluang memperoleh manfaat ekonomi melalui mekanisme penabungan sampah. Capaian pengumpulan sampah oleh unit bank sampah gereja menunjukkan adanya perubahan sampah dari sekadar residu lingkungan menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Dalam tiga kali penimbangan yang dilakukan oleh bank sampah unit gereja, volume sampah yang berhasil dikumpulkan telah mencapai sekitar 1 ton, dimana capaian satu ton

tersebut tidak hanya menunjukkan keberhasilan pengurangan sampah yang masuk ke lingkungan, tetapi juga menunjukkan terbentuknya potensi nilai ekonomi dari aktivitas pemilahan dan pengumpulan sampah yang dilakukan oleh jemaat.

Selain menambah pendapatan, perbaikan proses melalui mesin *press* dan *hoist crane* meningkatkan efisiensi kerja serta memperkuat posisi BSMT dalam rantai pasok daur ulang. Dengan demikian, manfaat ekonomi program tidak hanya berbentuk penerimaan tunai, tetapi juga peningkatan keterampilan, produktivitas, keselamatan kerja, dan kapasitas kelembagaan. Namun, nilai ekonomi sampah tidak selalu tinggi dan stabil karena dipengaruhi jenis material, harga pasar sekunder, volume, serta kemampuan pemasaran produk. Keberlanjutan ekonomi karena itu tidak dapat hanya bergantung pada penjualan sampah. Pengembangan produk kriya, pemanfaatan *eco-enzyme*, perluasan nasabah, dan jejaring dengan hotel, sekolah, gereja, pemerintah, serta pelaku usaha menjadi strategi diversifikasi yang penting. Pada tahap ini, program telah membangun fondasi bagi *income generation* dan ekonomi sirkular lokal, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan ketahanan ekonomi yang terbebas dari dukungan CSR.

Terakhir adalah dimensi sosial-spiritual. Capaian sosial-spiritual terlihat pada bertambahnya aktor yang terlibat serta berubahnya cara masyarakat memaknai pengelolaan sampah. Dalam dokumen pemetaan sosial menunjukkan bahwa masyarakat Penfui memiliki modal sosial yang cukup kuat: 23 dari 30 responden menyatakan sering mengikuti gotong royong, termasuk kegiatan kebersihan, dan terdapat praktik kerja sama antarumat beragama (PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari, 2024). Program memanfaatkan modal sosial tersebut dengan membangun ruang pertemuan melalui *roadshow*, unit bank sampah, sekolah, pameran, dan komunitas agama. Pengelolaan sampah yang semula dipandang sebagai urusan individual kemudian dibingkai menjadi tanggung jawab kolektif.

Keterlibatan GMIT memberi lapisan makna yang membedakan program ini dengan intervensi biasa. Melalui pelatihan bagi perwakilan gereja, penyampaian pesan lingkungan melalui jaringan jemaat, dan penyediaan sarana di lingkungan gereja, kepedulian ekologis dikaitkan dengan iman dan tanggung jawab menjaga ciptaan. Temuan Ramadani et al. (2025) menunjukkan bahwa legitimasi sosial-spiritual GMIT memperkuat penerimaan masyarakat terhadap praktik ekonomi sirkular dalam proses pengelolaan sampah di Bank Sampah. Dalam perspektif *lived religion*, iman tidak hanya diungkapkan melalui doktrin dan ritual, tetapi dipraktikkan melalui tindakan sehari-hari seperti memilah sampah, mengurangi pembakaran, menggunakan kembali material, dan menjaga kebersihan lingkungan.

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa gereja berfungsi sebagai jembatan antara nilai dan tindakan. Otoritas moral gereja membantu menjelaskan mengapa masyarakat perlu bertindak, sedangkan BSMT menyediakan cara bagaimana tindakan tersebut dapat dilakukan. Perusahaan, pada saat yang sama, menyediakan sumber daya yang memungkinkan nilai dan pengetahuan diwujudkan dalam sarana, pelatihan, dan inovasi. Hubungan ini menjelaskan bahwa efektivitas kolaborasi tidak bersumber dari dominasi satu aktor, melainkan dari kesesuaian fungsi: perusahaan sebagai fasilitator sumber daya, BSMT sebagai pengelola dan pusat pembelajaran, gereja sebagai pemberi legitimasi moral, pemerintah sebagai pendukung kelembagaan, serta masyarakat sebagai pelaku perubahan.

Meskipun demikian, pelebagaan nilai ekologis memerlukan pembiasaan yang berkelanjutan. Distribusi bak sampah dan pelaksanaan pelatihan merupakan keluaran awal; perubahan sosial-spiritual baru menguat ketika pemilahan, penyetoran, pengolahan, dan refleksi keagamaan dilakukan secara rutin. Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berupa jumlah kegiatan atau peserta, tetapi juga keberlanjutan unit bank sampah, konsistensi keterlibatan jemaat, kemampuan komunitas mengelola organisasi dan pendapatan, serta berkurangnya ketergantungan terhadap perusahaan.

Secara keseluruhan, Program Kampung Berseri menunjukkan bahwa mekanisme kolaborasi dibangun melalui penyelarasan masalah, pembagian peran, mobilisasi sumber daya, legitimasi keagamaan, dan pembentukan praktik bersama. Pendekatan *eco-religion* berperan dengan membingkai pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab iman, memperluas jangkauan edukasi melalui jaringan gereja, dan memberikan legitimasi moral bagi perubahan perilaku. Sementara itu, BSMT mengubah motivasi dan pengetahuan tersebut menjadi praktik ekonomi sirkular yang terorganisasi. Oleh karena itu, kontribusi utama program bukan hanya pada jumlah sampah yang dikelola, tetapi pada terbentuknya hubungan antara iman, kelembagaan, pembelajaran sosial, dan praktik ekologis dalam proses pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Program Kampung Berseri menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak hanya terbentuk melalui pembagian tugas administratif, tetapi melalui penyelarasan peran, sumber daya, dan nilai antaraktor. PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari berperan sebagai inisiator dan fasilitator sumber daya; Bank Sampah Mutiara Timor

menjadi pengelola sekaligus pusat pembelajaran teknis. GMT memberikan legitimasi moral dan jaringan sosial; pemerintah menyediakan dukungan kelembagaan. Sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Kolaborasi tersebut berlangsung melalui tahapan perencanaan, advokasi, edukasi, pendampingan, pembentukan unit, dan pengembangan inovasi pengelolaan sampah.

Pendekatan *eco-religion* berperan dalam menghubungkan nilai keagamaan dengan tindakan ekologis. Keterlibatan gereja membingkai pengelolaan sampah bukan hanya sebagai persoalan teknis dan kebersihan, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab iman dalam menjaga ciptaan Tuhan. Otoritas moral dan jaringan jemaat membantu memperkuat penerimaan masyarakat, sedangkan bank sampah menyediakan ruang praksis untuk menerjemahkan nilai tersebut menjadi tindakan sehari-hari. Integrasi keduanya berkontribusi terhadap pemberdayaan dalam dimensi ekologis melalui perluasan praktik pemilahan dan pengelolaan sampah; dimensi ekonomi melalui penciptaan nilai tambah, pendapatan, dan efisiensi kerja; serta dimensi sosial-spiritual melalui penguatan tanggung jawab kolektif dan aktualisasi iman dalam kehidupan sosial.

Meskipun demikian, capaian tersebut merupakan proses pemberdayaan yang masih berkembang dan belum sepenuhnya menunjukkan kemandirian masyarakat. Keberlanjutan program memerlukan penguatan tata kelola BSMT, perluasan pasar produk daur ulang, pembiasaan praktik ekologis di lingkungan jemaat, dukungan kebijakan pemerintah daerah, serta pengurangan ketergantungan terhadap pendanaan CSR. Penelitian berikutnya perlu menggunakan pengukuran longitudinal untuk menilai konsistensi perubahan perilaku, perkembangan pendapatan, partisipasi masyarakat, dan pengurangan sampah yang masuk ke TPA. Dengan demikian, kontribusi utama Program Kampung Berseri terletak pada kemampuannya mempertemukan CSR, kelembagaan komunitas, dan nilai keagamaan menjadi gerakan ekologis yang konkret dan terorganisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., & Handayani, S. L. (2022). Eco-theological construction of waste management in the Rehobot Church congregation, Kupang City, East Nusa Tenggara. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(3), 228–239.
<https://doi.org/10.22500/10202238628>

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Depok: Rajawali Pers.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Berry, R. J. (Ed.). (2006). *Environmental Stewardship: Critical Perspectives, Past and Present*. T&T Clark.
- Boff, L. (1997). *Cry of the earth, cry of the poor*. Orbis Books.
- Chang, W. (2001). *Moral Lingkungan Hidup*. Kanisius.
- Clarke, G. (2006). Faith matters: Faith-based organisations, civil society and international development. *Journal of International Development*, 18(6), 835–848.
<https://doi.org/10.1002/jid.1317>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Deane-Drummond, C. (2008). *Eco-theology*. Saint Mary's Press.
- Deneulin, S., & Bano, M. (2009). *Religion in development: Rewriting the secular script*. Zed Books.
- Devi, A. S., & Kumalasari, A. (2023). Corporate social responsibility program: Based on community development in the village. *Journal of Community Service and Empowerment*, 5(1). <https://doi.org/10.22219/jcse.v5i1.31445>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fowler, R. B. (1995). *The greening of Protestantism: Religion and environmentalism in the United States*. University of North Carolina Press.
- Francis. (2015). *Laudato si': On care for our common home [Encyclical letter]*. The Holy See.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.
- Gottlieb, R. S. (2006). *A greener faith: Religious environmentalism and our planet's future*. Oxford University Press.
- Grim, J., & Tucker, M. E. (2014). *Ecology and Religion*. Island Press.
- Hidayah, A., Lelono, S., & Ramadani, B. (2025). Mengelola sampah dengan kearifan lokal: Studi kasus Bank Sampah Mutiara Timor di Kota Kupang. *Learning Society: Jurnal*

- CSR, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 6(1), 456–470.
<https://doi.org/10.30872/ls.v6i1.5692>
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education Australia.
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2026). *Rakornas Pengelolaan Sampah 2026: Menteri LH Tegaskan Transformasi Total Tata Kelola Sampah Nasional*. Diakses dari: <https://kemenlh.go.id/news/detail/rakornas-pengelolaan-sampah-2026-menteri-lh-tegaskan-transformasi-total-tata-kelola-sampah-nasional>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- McFague, S. (1993). *The body of God: An ecological theology*. Augsburg Fortress.
- McGuire, M. B. (2008). *Lived religion: Faith and practice in everyday life*. Oxford University Press.
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Moltmann, J. (1985). *God in creation: A new theology of creation and the Spirit of God*. Harper & Row.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. SAGE Publications.
- Prabowo, H. S., Wardhanie, M. S. A., Sormin, J. M. I., Dana, K. A. C., Priastana, J., Lontoh, J. L. L., & Satya, A. D. (2020). *Panduan umum eco-rumah ibadah 6 (enam) agama untuk pengendalian perubahan iklim*. Yayasan ICLEI–Local Governments for Sustainability Indonesia.
- Pemerintah Kota Kupang. (2026). *Didukung pusat, Wali Kota siap jadikan Kota Kupang percontohan pengelolaan sampah di NTT. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kupang*. Diakses dari: <https://prokopim.kupangkota.go.id/site-berita/read/342-didukung-pusat-wali-kota-siap-jadikan-kota-kupang-percontohan-pengelolaan-sampah-di-ntt>
- PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari. (2024). *Laporan pemetaan sosial dan pemangku kepentingan 2024* [Laporan internal].

- PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari. (2025a). *Dokumen rencana strategis CSR AFT El Tari* [Dokumen internal].
- PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari. (2025b). *Laporan monitoring dan evaluasi Program CSR Kampung Berseri 2025* [Laporan internal].
- PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari. (2026). *Rencana kerja CSR tahunan 2026* [Dokumen internal].
- Rakodi, C. (2012). A framework for analysing the links between religion and development. *Development in Practice*, 22(5–6), 634–650.
<https://doi.org/10.1080/09614524.2012.685873>
- Ramadani, B., Guritno, R. B. P., Lelono, S., Firdaus, M. I., & Musdiyanto. (2025). Harmonization of the faith-based approach and inclusive circular economy (in promoting the success of waste management): A case study of the CSR Program Kampung Berseri by PT Pertamina Patra Niaga AFT El Tari. *INFLUENCE: International Journal of Science Review*, 7(2), 99–108.
<https://doi.org/10.54783/influencejournal.v7i2.285>
- Risa, Y. (2019). Community empowerment as the corporate's social responsibility: Case study of PT. Tirta Investama Plant Solok, Indonesia. *Varia Justicia*, 15(2), 43–50.
<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i2.2940>
- Sari, I. M., Vonika, N., Arsyad, F., & Khoerunnisa, S. V. (2025). Integrasi CSR, environmental sustainability dan community development: Systematic literature review. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 7(1).
- Seyfang, G., & Smith, A. (2007). Grassroots innovations for sustainable development: Towards a new research and policy agenda. *Environmental Politics*, 16(4), 584–603.
<https://doi.org/10.1080/09644010701419121>
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.
- Suwerda, B. (2012). *Bank Sampah: Membongkar Mitos Sampah Menjadi Berkah*. Pustaka Rihama.

- Taylor, B. (2010). *Dark green religion: Nature spirituality and the planetary future*. University of California Press.
- Tomalin, E. (2013). *Religions and development*. Routledge.
- White, L., Jr. (1967). The historical roots of our ecologic crisis. *Science*, 155(3767), 1203–1207. <https://doi.org/10.1126/science.155.3767.1203>
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Kencana